

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri setiap manusia dan bersifat universal. Salah satu hak dasar yang menjadi bagian dari hak asasi manusia adalah untuk memilih. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak untuk memilih bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas mental. Di dalam skripsi ini, dibahas mengenai Kewajiban Negara Memenuhi Hak untuk Memilih bagi penyandang disabilitas mental, dengan fokus pembahasan pada Pemilihan Walikota Semarang tahun 2020.

Skripsi ini bertujuan untuk melihat regulasi baik secara nasional maupun internasional dan implementasi yang berkaitan dengan kewajiban negara memenuhi hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas mental khususnya pada saat Pemilihan Walikota Semarang tahun 2020. Metode pendekatan penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini menunjukkan adanya inkonsistensi pada regulasi dan kekurangan pada implementasi meskipun KPU Kota Semarang telah berupaya mengakomodir hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas mental. Berdasarkan hal tersebut, pada bagian akhir skripsi ini, terdapat beberapa poin rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar pemberian hak untuk memilih bagi penyandang disabilitas mental dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak untuk Memilih, Penyandang Disabilitas Mental, Kewajiban Negara, Pemilihan Walikota Semarang tahun 2020.

ABSTRACT

Human rights is the rights that are inherent in every human being and are universal. One of the basic rights that are part of human rights is the right to vote. Indonesia as a democratic country has an obligation to protect, respect, and fulfill the right to vote for every citizen without exception, including people with mental disabilities. This thesis discusses about the right to vote for persons with mental disabilities, with a focus on the discussion of the 2020 Semarang Mayor Election.

This thesis objective is to look at regulations both nationally and internationally and their implementation related to the state's obligation to fulfill the right to vote for persons with mental disabilities, especially during the Semarang Mayor Election in 2020. This research uses the doctrinal research approach with the research specification that is descriptive-analytical.

The results of the research conducted in this thesis indicate that there are inconsistencies in regulations and shortcomings in implementation even though the General Election Commission of the City of Semarang City has tried to accommodate the right to vote for people with mental disabilities. Based on this, at the end of this thesis, there are several recommendation points that are expected to be material for improvement so that the granting of the right to vote for people with mental disabilities can be implemented optimally.

Keywords: Human Rights, Right to Vote, People with Mental Disabilities, State Obligations, Election of Mayor of Semarang in 2020.